

MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT

Sukron Mazid, Kuswan Hadji

Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang

E-mail: sukronmazid@untidar.ac.id, kuswan.hadji@yahoo.co.id

Abstract: *The House of Representatives Peoples (DPRD) council is a legislative body which is at the district level have a job develop skills of citizenship in the community. To arm of political parties have, but also has a big job as representatives of the people who convey the aspirations of the people. This study attempts: (1) describe political communication models conducted by a member of the city council magelang with in an effort mastery citizenship skills (civic skills) communities in magelang with. (2) decipher the stages in political communication skills as a parliament member mastery of citizenship (civic skills) communities in magelang with. This research used a qualitative approach through the kind of research descriptive.*

Keywords: model, political communication the civic skills.

Abstrak: *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat daerah yang memiliki tugas mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dimasyarakat. Tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik saja, tapi juga memiliki tugas besar sebagai wakil masyarakat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan Model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. (2) Menguraikan tahapan komunikasi politik anggota DPRD sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.*

Kata kunci: model komunikasi politik, civic skills.

Pendahuluan

Kasus pelanggaran tindak pidana korupsi akhir-akhir ini semakin meningkat baik dalam arus infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Badan legislatif baik pusat maupun daerah yang termasuk di dalam ranah suprastruktur politik seharusnya tidak melakukan tindak pidana korupsi walaupun pada kenyataannya justru semakin meningkat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat baik pada tingkat lokal maupun pusat.

Penilaian masyarakat yang kurang baik pada anggota legislatif tidak hanya dikarenakan kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat daerah, namun juga dikarenakan menurunnya kinerja DPRD. Menurunnya kinerja DPRD dalam menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPRD jelas terlihat dari produk hukum yang terealisasi dilapangan. Produk hukum yang dikeluarkan sangat minim dan kurang pro rakyat sehingga masyarakat menjadi kurang percaya pada wakil rakyat. Hal ini di buktikan dari fakta hasil survei yang dilakukan *Cirus Surveyors Group* yang dilakukan pada 20 November – 30 Desember 2013 yang menyebutkan bahwa Hasil survei *Cirus* memperlihatkan

sebanyak 53,6 persen responden menilai anggota DPR periode 2009-2014 tidak memperjuangkan anggaran kepentingan rakyat. Kemudian sebanyak 51, 9 persen responden menilai anggota DPR belum melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan baik (*Cirus Surveyors Group*, 30 Desember 2013). Ketidakpercayaan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah karena hubungan antara peran DPRD dan keterampilan warganegara (*civic skills*) masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan yang belum menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesenjangan hubungan antara masyarakat dan para pejabat legislatif yang seharusnya tidak terjadi karena dalam demokrasi perwakilan anggota badan legislatif merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Membangun kesadaran warga negara yang aktif membutuhkan banyak elemen pendukung yang saling bersinergi. Pembentukan karakteristik keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) menjadi salah satu hal penting sesuai dengan relevansi Pancasila sebagai cita-cita bangsa.

Relevansi Pancasila dalam hal ini adalah sebagai basis pengembangan keterampilan kewarganegaraan yang partisipan adalah dengan melihat Pancasila

sebagai dasar Negara yang mengarahkan bangsa kita untuk mencapai tujuan.

Menurut Dan Nimmo (2005: 2-23) komponen komunikasi politik meliputi: Source (sumber); Encoding (proses penyandian); Message (pesan); Channel (saluran); Noise (hambatan); Receiver (penerima); Decoding (Proses penerimaan); Receiver response (perangkat reaksi); umpan balik; situasi komunikasi. Dedi Mulyana (2016:145-172) mengatakan model model komunikasi sebagai berikut. Sedangkan Jhon R. Werenburg et al. (1974:10) mengatakan model komunikasi paling klasik, yang sering disebut model retorik (*rhetorical model*).

Pandangan Anwar Arifin (2011: 11) bahwa komunikasi politik bertujuan membentuk dan membina pendapat umum (fenomena komunikasi politik yang sudah lama dikaji oleh politikus) serta mendorong partisipasi politik yang dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik dalam hal ini sangat penting yaitu khalayak memberikan suaranya kepada politikus dan partai politik dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah.

Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisiplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu,

terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik (Cangara, 2014: 12).

Anwar Arifin megemukakan (2011: 1) komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (*art of possible*) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (*art of impossible*) Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Selanjutnya Anwar Arifin (2011: 8) komunikasi dan politik menyatu menjadi komunikasi politik yang sesungguhnya telah dipraktekkan sejak manusia berkomunikasi dan berpolitik. Komunikasi politik pada hakikatnya berpadu dan bertemu pada dua titik yaitu: (1) pembicaraan dan (2) pengaruh atau mempengaruhi. Tujuan komunikasi politik menurut Anwar Arifin (2011: 177) komunikasi politik bertujuan membentuk dan membina citra dan opini publik, mendorong partisipasi politik, memenangi pemilihan, dan memengaruhi kebijakan politik negara atau kebijakan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tentunya membutuhkan saluran ataupun media. Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya (Anwar Arifin, 2011: 65-98), adalah sebagai berikut:

1. *Retorika* 2. *Agitasi Politik* 3. *Propaganda* 4. *Public Relations Politik* 5. *Kampanye Politik* 6. *Lobi Politik*. Jika kita melihat penjelasan lain dari Ardial (2010: 13).

John J. Patrick (2001:34) mengelompokkan komponen pendidikan kewarganegaraan menjadi empat yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi dan kebajikan dan watak kewarganegaraan. Keterampilan warga negara perlu dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh masyarakat menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Menurut Bronson, S Margaret (1999: 15-16) *civic skills* mencakup kecakapan *intelektual skills* dan *partisipatory skills*, kecakapan-kecakapan tersebut dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*.

Semua komponen diatas merupakan komponen keterampilan kewarganegaraan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu komponen pengetahuan

kewarganegaraan harus dilengkapi dengan pengembangan keterampilan warga negara dan disposisi warga negara yang memungkinkan dan mendorong partisipasi. (Vontz, Metcalf, & Patrick, 2000: 49).

Konsep pendidikan politik menurut Crick (2004: 6) diawali dari persepsi sederhana politik adalah tentang hubungan penguasa atau pemerintah dan rakyatnya atau negara dan warganya. Untuk memahami konsep dasar dari pendidikan politik tersebut maka Crick menjelaskan tentang model hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari hubungan tersebut menciptakan beberapa konsep-konsep dasar yang wajib dipahami oleh warganegara agar dapat melek politik. Miriam Budiarjo (2000: 183) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Tujuan negara merupakan cita-cita negara yang berimplikasi pada pembentukan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-

sifat sosial manusia (yang bersifat horisontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia (Yudi Latif, 2012: 43). *Civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan yang ada di daerah perlu dikembangkan mengingat demokrasi di Indonesia yang tidak stabil. Demokrasi yang stabil akan menciptakan masyarakat yang tidak rawan konflik. Masyarakat yang kritis, damai, sejahtera tentu menjadi dambaan setiap daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Belum maksimalnya pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dilakukan oleh para anggota DPRD yang notabene adalah wakil rakyat dan merupakan kader dari partai politik membuat para wakil rakyat ini ingin mengembangkan *civic skills* melalui pendidikan politik yang dikukan dengan memperbaiki komunikasi politik antara warga dan anggota dewan. Pentingnya pengembangan keterampilan kewarganegaraan menjadi salah satu wacana dan upaya agar masyarakat memiliki budaya kewarganegaan yang baik.

Salah satu lembaga strategis yang dapat mengembangkan keterampilan kewarganegaraan selain sekolah, partai politik, LSM dan organisasi masyarakat lainnya adalah lembaga legislatif. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat daerah yang memiliki tugas mengembangkan keterampilan kewarganegaraan di masyarakat. Tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik saja, tapi juga memiliki tugas besar sebagai wakil masyarakat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Hal ini menjadi ironis ketika apa yang diberitakan media justru menunjukkan bahwa pencitraan anggota DPR atau DPRD sangat kurang baik apalagi banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menunjukkan sikap dan arogansi anggota DPR yang di ekspos ke layar televise ketika rapat.

Berdasarkan hasil prasurvey pada hari Senin, 11 September 2017 di DPRD Kabupaten Magelang sedang berupaya mengembangkan *civic skills* di Magelang melalui strategi komunikasi politik. Komunikasi politik dalam sistem politik di negara demokrasi dianggap sebagai elemen penting. Menurut Budi Winarno (2007: 14) “komunikasi politik mengalir tidak hanya dari penguasa politik atau pemerintah ke masyarakat atau warga negara, tetapi juga sebaliknya”. Komunikasi politik yang terjalin baik dari pemberi pesan dan penerima pesan dapat menjadi harmonisasi politik yang baik pula

bagi pembangunan keterampilan kewarganegaraan.

Dengan demikian keterampilan kewarganegaraan benar-benar dapat terwujud. Masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut *Pertama* Bagaimana model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Kabupaten Magelang. *Kedua* Bagaimana tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Kabupaten Magelang. Tujuan Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana model komunikasi politik serta tahapan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Kabupaten Magelang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono, 2014) Tempat penelitian ini

adalah di DPRD Kabupaten Magelang. Sumber Data Informan atau narasumber anggota DPRD Kabupaten Magelang, sedangkan teknik dan instrumen pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tringulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Upaya Penguasaan Civic Skills Masyarakat di Kabupaten Magelang

Setelah kita melihat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2019 dalam upaya penguasaan *civic skills* masyarakat di Kabupaten Magelang adalah model komunikasi Laswell yaitu menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat dengan intensif yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan langsung berdialog dengan masyarakat saat melaksanakan tugas-tugas dan segala sesuatu yang telah diprogramkan dan juga direncanakan, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui media masa

yaitu melalui majalah, koran lokal yang diterbitkan oleh Sekwan Kabupaten Magelang dan juga melalui media sosial dan radio.

Berdasarkan temuan tersebut apabila kita menganalisis dari unsur-unsur yang membentuk proses komunikasi politik seperti teori yang dikemukakan oleh Cangara bahwa unsur yang membentuk komunikasi politik terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, efek dan umpan balik. Menurut saya dilihat dari unsure tersebut anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam melakukan komunikasi politik telah sesuai dengan unsur tersebut. Bedanya adalah saat melakukan komunikasi politik langsung media yang digunakan adalah suara langsung, sedangkan saat melakukan komunikasi politik tidak langsung menggunakan media cetak dan media sosial serta melalui saluran radio.

Para anggota DPRD Kabupaten Magelang melakukan upaya penguasaan *civic skills* melalui pendidikan politik dan partisipasi politik. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dan fungsi dari komunikasi politik itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Arifin Anwar, Ardial dan Cangara bahwa benang merah dari tujuan komunikasi politik adalah tersampainya pesan politik kepada penerima pesan politik.

Pesan yang akan disampaikan bisa bermacam-macam diantaranya adalah pesan tentang pencitraan publik, pesan yang berupa pendidikan politik dan lain sebagainya.

Hal tersebut sesuai yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang yang dalam temuan penelitian ini juga melakukan hal tersebut. Mereka juga memelihara citra diri pada publik yang nantinya tentu akan memelihara ketokohan mereka. Seperti tujuan dari penelitian ini yaitu melihat upaya penguasaan *civic skills* yang dilakukan oleh DPRD Magelang dan dari sisi tujuan komunikasi politik mereka melakukannya terutama yang berupa pendidikan politik dalam upaya mengembangkan keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills*.

Kemudian jika kita melihat dari sisi fungsi komunikasi politik jelas yang dilakukakan oleh DPRD Magelang periode 2014-2019 sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhamad Rosit bahwa fungsi dari komunikasi politik diantaranya adalah:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat

- b. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan kebijakan politik
- c. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris maupun pendukung partai
- d. Menjadi *platform* yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga bisa menjadi pembicaraan dalam bentuk opini publik
- e. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi, tentang cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara
- f. Menjadi hiburan masyarakat dalam pesta demokrasi sebagai dengan menampilkan artis, juru kampanye, para komentator ataupun pengamat politik
- g. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman sparatisme yang mengancam persatuan nasional
- h. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi
- i. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda *setting*, dan komentar-komentar politik.

Dari hasil temuan yang ada di lapangan anggota DPRD Kabupaten Magelang melakukan fungsi komunikasi politik di atas melalui program-program yang mereka buat, mereka laksanakan dan mereka evaluasi. Baik saat melakukan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat ataupun saat mereka berperan sebagai kader partai politik yang membesarkan nama mereka masing-masing. Jika kita menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana model yang dilakukan kita dapat mengkaji dari teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Laswell, Cangara dan Schoroder bahwa model komunikasi politik yang baik dan matang tentunya selain dirancang oleh orang yang kompeten dan berpengaruh dibidangnya namun juga memiliki manajemen strategi yang baik. Dalam manajemen model terdapat bagian-bagian dasar yang penting untuk diketahui karena merupakan modal dasar dalam penyusunan, pengembangan dan pengimplementasian sebuah strategi.

Beberapa teknik dan pendekatan analisa model dapat dipergunakan dalam perencanaan, penyusunan dan pengembangan strategi saat mengatasi perubahan lingkungan suatu organisasi maupun dalam proses manajemen strategi. Semua hal tersebut juga telah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang

periode 2014-2019 karena mereka selalu melibatkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya saat menyusun sebuah program kerja atau perda. Mereka juga melakukan analisis SWOT dan memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan masyarakat ketika membuat program atau pun perda dengan memaksimalkan penjangkauan aspirasi dan langsung turun lapangan. Setiap program yang telah dilaksanakan juga dilakukan evaluasi seperti saat kunjungan kerja.

Melihat upaya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2016 dalam penguasaan *civic skills* masyarakat mereka jelas mengupayakannya yaitu melalui pendidikan politik dan partisipasi politik. Sebagai konstituen atau wakil rakyat mereka melakukan praktik partisipasi politik dengan maksud agar masyarakat juga terdorong untuk melakukan hal yang sama sehingga masyarakat menjadi lebih aktif. Bila kita mengacu pada pendapat Bronson, bahwa kecakapan intelektual meliputi :

- a. Mengidentifikasi (*identifying*)/menandai menunjukkan
- b. Menggambarkan (*describing*)/memberikan ilustrasi atau uraian
- c. Menjelaskan (*explaining*)/mengklarifikasi atau menafsirkan

- d. Menganalisis (*analyzing*)
- e. Menilai (*evaluating*)/ mengevaluasi pendapat atau posisi
- f. Mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu (*taking and defending positions on public issue*)

Para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Magelang memiliki kecakapan intelektual tersebut seperti yang disampaikan oleh Bronson. Mereka juga mengupayakan agar masyarakat Magelang memiliki kecakapan intelektual seperti mampu mengidentifikasi, menggambarkan dan menilai suatu pendapat publik. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendidikan politik melalui pelatihan, Bimtek, sarasehan maupun dialog-dialog langsung saat berada ditengah masyarakat dengan memberikan pesan-pesan persuasif pada masyarakat. Mereka juga memberi contoh pada mereka melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diikuti diwilayah dapil masing-masing.

Pendidikan politik yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2019 juga melalui media cetak dan elektronik sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, ketika turun ke lapangan juga mereka melakukan pendidikan politik pada dapil mereka dan kader-kader partai yang ada dalam partai politik yang mengusung nama mereka. Sedangkan dalam mengupayakan

penguasaan *civic skills* pada aspek *partisipatory skills* seperti yang dikemukakan Bronson seperti dibawah ini :

- a. Berinteraksi (*interacting*) termasuk berkomunikasi terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik
- b. Memantau (*monitoring*) masalah politik dan pemerintah terutama dalam penanganan persoalan publik
- c. Memengaruhi (*influencing*) proses politik pemerintah baik secara formal maupun informal.

Mereka mengupayakan hal tersebut pada masyarakat Magelang dengan mengajak langsung berinteraksi, memantau dan memengaruhi proses politik dengan cara berdialog, pelatihan dan memberitahu kepada masyarakat ketika akan memberikan saran, kritik ataupun keluhan tentang kinerja pemerintah maupun kinerja wakil rakyat mereka. Anggota DPRD Kabupaten Magelang juga menghimbau agar tidak enggan memberikan saran terhadap pelayanan publik saat menjangir aspirasi masyarakat.

Mengkaji temuan yang saya dapatkan saat penelitian, jika kita menganalisis menggunakan pendapat Mary Kirlin yang menyatakan bahwa bagaimana kategori dan cakupan dari *civic skills*

secara menyeluruh. Indikator penguasaan *civic skills* yang dimiliki masyarakat bisa kita nilai dan analisis menggunakan pertanyaan Apakah masyarakat bisa berorganisasi dengan baik ataukah berkomunikasi dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan serta berfikir kritis dalam kehidupan kewarganegaraan bisa kita telusuri dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Menjadi hal penting dalam kehidupan bernegara untuk mengetahui apakah masyarakat kita tergolong memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik, ataukah justru masyarakat kita tidak menguasai keterampilan kewarganegaraan yang baik, karena memang para wakil mereka tidak mengupayakannya ataukah karena masyarakat yang ada saat ini semakin acuh.

Ada banyak cara dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar masyarakat untuk meningkatkan penguasaan keterampilan kewarganegaraan masyarakat. Agar masyarakat menjadi lebih paham dan peka serta mau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, ataukah dapat memilih para pemimpin mereka dengan pilihan yang rasional dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Tentunya masyarakat harus mendapatkan pendidikan politik sehingga

dapat berpartisipasi politik dengan baik yang rasional tanpa dimobilisasi.

Kata kunci yang disampaikan oleh Mary Kirlin sebagai indikator penguasaan *civic skills* masyarakat adalah mampu berfikir kritis. Logikanya, orang yang mampu berfikir kritis akan memiliki kecakapan intelektual dan partisipasi yang rasional. Ketika mengikuti pemilu yang dipilih adalah calon yang benar-benar baik dan mampu memberi teladan bagi masyarakat, bukan malah memilih calon karena dibayar dengan sejumlah uang atau pun dengan alasan yang pragmatis yang menunjukkan bahwa partisipasi mereka dimobilisasi. Untuk membentuk masyarakat yang mampu berfikir kritis bertindak dengan bijak tentu harus melalui proses yang panjang, diantaranya melalui pendidikan politik.

Hal ini sudah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2019 walaupun perubahan sikap dan perilaku masyarakat kearah mampu berfikir kritis belum terlihat secara signifikan namun telah menunjukkan kearah perubahan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan bahwa peningkatan partisipasi saat pemilu di Kabupaten Magelang cukup tinggi, tingkat kejahatan juga cukup rendah, peningkatan pendapatan perkapita dan panen raya tembakau dan kopi yang kualitasnya semakin mendunia.

Tahapan Komunikasi Politik DPRD Kabupaten Magelang

Setelah kita melihat hasil temuan di lapangan tentang tahapan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2019 dalam upaya penguasaan *civic skills* masyarakat tentunya dapat kita analisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Cangara. Cangara menyatakan bahwa langkah-langkah penetapan strategi komunikasi politik diantaranya adalah sebagai berikut: penemuan dan penetapan masalah; penetapan tujuan kemudian strategi yang terdiri dari: penetapan komunikator; penetapan target sasaran dan analisa kebutuhan khalayak; penyusunan pesan-pesan; pemilihan media dan saluran komunikasi; evaluasi. Sedangkan model strategi bisa menggunakan model analisis SWOT.

Model analisis SWOT yaitu model yang melihat dari empat aspek yaitu: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk menetapkan strategi dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis.

Dari tampilan di atas kita dapat menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Wheelen dan J. David Hunger yang menjelaskan model dasar

dari manajemen strategi terdiri dari empat elemen dasar yaitu:

- a. Mengamati lingkungan, yaitu dengan mengawasi, mengevaluasi dan menyebarkan informasi baik dari lingkungan eksternal maupun internal untuk keserasian dan keselarasan yang akan menentukan masa depan organisasi, dengan bahasa lain adalah mengidentifikasi faktor eksternal dan internal untuk masa depan suatu organisasi.
- b. Formulasi strategi, yaitu dengan mengembangkan rencana jangka panjang guna mengatasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan suatu organisasi.
- c. Implementasi strategi, yaitu suatu proses dimana strategi dan kebijakan diletakkan dalam pelaksanaan melalui pengembangan program, alokasi maupun prosedur.
- d. Evaluasi dan pengawasan, merupakan suatu proses untuk menilai hasil pelaksanaan dan dibandingkan dengan target pencapaian yang akan dicapai oleh suatu organisasi (Wheelen dan J. David Hunger. 2006: 10-18).

Tahapan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wheelen dan J. David Hunger. Semua elemen dasar dilakukan

oleh DPRD Kabupaten Magelang. Mereka juga sangat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pesan dari komunikator sampai dengan baik dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan atau tidak. Setiap menentukan strategi melalui tahapan yang dilakukan para wakil rakyat di Kabupaten Magelang memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Kondisi sosial masyarakat yang menerima pesan persuasif
- b. Tingkat pendidikan masyarakat
- c. Perkiraan hambatan yang dihadapi seperti penolakan dan sikap apatis masyarakat
- d. Dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kata lain DPRD Kabupaten Magelang menggunakan analisis SWOT dalam penentuan strategi dan melakukan tahapan komunikasi politik kepada masyarakat Magelang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka dapat ditarik simpulan *pertama*, model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Kabupaten Magelang adalah melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung

dilakukan dengan berdialog langsung, bersilaturahmi dengan masyarakat.

Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, media sosial dan media elektronik. Dalam mengupayakan penguasaan *civic skills* masyarakat strategi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2014-2019 adalah dengan melakukan pendidikan politik dan praktik partisipasi politik. Pendidikan politik diintegrasikan kedalam program-program kerja DPRD, sedangkan partisipasi politik dilakukan dalam rangka memberi keteladanan agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi politik dan mau ikut serta dalam kegiatan partisipasi yang lain. Upaya penguasaan *civic skills* masyarakat dilakukan melalui Pelatihan, Bimtek, Dialog langsung, Sarasehan dan keteladanan.

Kedua, Tahapan komunikasi politik anggota DPRD berlangsung sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) masyarakat di Kabupaten Magelang dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan cara merencanakan komunikasi dengan cara penemuan dan penetapan masalah; penetapan tujuan kemudian strategi yang terdiri dari: penetapan komunikator; penetapan target sasaran dan analisa

kebutuhan khalayak; penyusunan pesan-pesan; pemilihan media dan saluran komunikasi. Sedangkan tahap pelaksanaan dengan melakukan komunikasi politik sesuai dengan target dan rencana yang telah disepakati. Pelaksanaannya dilakukan baik bersama dalam kelompok maupun individu sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya tahap evaluasi dengan melakukan rapat koordinasi setiap program yang telah dilaksanakan dengan komunikasi politik yang baik. Dengan menghasilkan refleksi dan saran untuk program kedepan yang hampir serupa.

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin. (2011). *Komunikasi politik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Budi Winarno. (2007). *Sistem politik Indonesia Era reformasi*. Yogyakarta: Med Pres.
- Cangara. (2007). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cirus Surveyors Group, 30 Desember. Hasil Survey 2013.
- Cogan, J.J.& derrickott, Ray. (1998). *Citizenship education for 21 st century: setting the contex*. London: Kogan page.
- Crick, B. (2004). *Basic Concept for Political Education . Essays on Citizenship*. London: Continuum.

- Dan Nimmo. (2005). *Komunikasi politi: komunikator, pesan dan media*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiyatmo, dkk. (2005). *Pendidikan politik unttnk masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Dedi. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patrick, John J. and Thomas S. Vontz. (2001). *Compenents of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teacher''*. Dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds). *Principles and practices of democracy in the education of social studies teacher*, Bloomington, IN: Eric Clearinghouse for Social Studies/Social science Education ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, pp. 39-64.
- Patrick, John J. Metcalf, Kim K. 7 Vontz, Thomas S. (2000). *Project citizen and the civic development adoslescent students in indiana, lutviana and Lithuania*. Eric.
- Rapika. (2013). *Strategi Kampanye Politik Koalasis Partai Pengusung Afi-mukmin Dalam Pemilu Gubernur Tahun 2013*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 2013 Hal. 220-134 UnMul.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vardiansyah, Dani. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Indeks.
- Yudi Latif. (2012). *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.